

**SCHOOL EMPOWERMENT THROUGH THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM
BASED ON SHARIA ECONOMIC LAW VALUES AT A PRIVATE JUNIOR HIGH
SCHOOL IN THE SEI BEJANGKAR AREA**

**PEMBERDAYAAN SEKOLAH MELALUI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
BERBASIS NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI SMP SWASTA DAERAH
SEI BEJANGKAR**

Amrin¹, Janeska Widia², Jasa Ginting³, Yessi Kurnia A. Manik⁴, Benhur Pakpahan⁵

Politeknik Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*amrin@polmed.ac.id

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This community service program strengthened the Free Nutritious Meal Program (MBG) by integrating halal, thayyib, balance, benefit, and responsible consumption principles at SMP Swasta Daerah Sei Bejangkar, North Sumatra. The activity was implemented on 26 August 2026 through participatory counseling, dialogue, case discussion, and school mentoring. Initial identification showed limited understanding of balanced nutrition and the thayyib dimension of food, alongside socioeconomic constraints: 50% of 500 families earned below IDR 1.5 million per month and 65% received social assistance. Descriptive evaluation through observation, questions and answers, participant responses, and teacher reflection showed improved understanding of balanced nutrition, halal-thayyib food, healthy food selection, food hygiene, and the avoidance of waste. Participants were actively involved and considered the material relevant to strengthening MBG implementation. The school followed up by maintaining educational media, involving teachers in continued reinforcement, and integrating healthy and Islamic consumption messages into school guidance. The program transformed MBG from food distribution into a medium for health, character, and sharia-compliant consumption education, thereby supporting SDG 3 and SDG 4.

Keywords: *free nutritious meals; halal and thayyib; Sharia economic law; school empowerment; student nutrition*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui integrasi prinsip halal, thayyib, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab konsumsi di SMP Swasta Daerah Sei Bejangkar, Sumatera Utara. Kegiatan dilaksanakan pada 26 Agustus 2026 melalui penyuluhan partisipatif, dialog, pembahasan kasus, dan pendampingan sekolah. Identifikasi awal menunjukkan keterbatasan pemahaman gizi seimbang dan dimensi thayyib serta kendala sosial ekonomi: dari 500 keluarga, 50% berpendapatan kurang dari Rp1.500.000 per bulan dan 65% menerima bantuan sosial. Evaluasi deskriptif melalui observasi, tanya jawab, respons peserta, dan refleksi guru menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai gizi seimbang, halal-thayyib, pemilihan makanan sehat, kebersihan pangan, dan pencegahan pemborosan. Peserta terlibat aktif dan menilai materi relevan untuk memperkuat pelaksanaan MBG. Sekolah menindaklanjuti kegiatan dengan mempertahankan media edukasi, melibatkan guru dalam penguatan berkelanjutan, serta mengintegrasikan pesan konsumsi sehat dan Islami dalam pembinaan sekolah. Program berhasil mengembangkan MBG dari kegiatan distribusi makanan menjadi media pendidikan kesehatan, karakter, dan konsumsi sesuai syariah, sekaligus mendukung SDG 3 dan SDG 4.

Kata Kunci: *makan bergizi gratis; halal dan thayyib; hukum ekonomi syariah; pemberdayaan sekolah; gizi siswa*

1. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki posisi strategis dalam memperkuat kesehatan, kesiapan belajar, dan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersalurkannya makanan kepada peserta didik. Mutu bahan, keseimbangan gizi, kebersihan, keamanan, penerimaan siswa, dan terbentuknya kebiasaan konsumsi sehat menentukan apakah pemberian makanan menghasilkan manfaat pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan. Kajian mengenai MBG menegaskan bahwa program tersebut berhubungan dengan agenda kesejahteraan, keadilan sosial, hak pendidikan, dan pembangunan manusia, sehingga pelaksanaannya memerlukan pendekatan lintas sektor (Sujud, 2026; Carvallo et al., 2026).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, makanan tidak hanya harus halal secara zat dan proses, tetapi juga *thayyib*, yaitu baik, aman, bersih, bergizi, dan memberikan kemanfaatan. Kerangka tersebut menghubungkan pemenuhan pangan dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan sebagai bagian dari *maqashid syariah*. Analisis Nuraini, Sutopo, dan Albab (2025) menunjukkan bahwa MBG dapat dibaca sebagai instrumen kemaslahatan apabila penyelenggaraannya menjamin kualitas, keberlanjutan, keadilan akses, dan akuntabilitas. Karena itu, nilai syariah tidak ditempatkan sebagai tambahan simbolik, melainkan sebagai prinsip yang mengarahkan pemilihan bahan, pengolahan, distribusi, konsumsi, dan evaluasi manfaat.

Kebutuhan tersebut terlihat pada SMP Swasta Daerah Sei Bejangkar, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Sekolah telah mendukung pelaksanaan MBG, tetapi identifikasi awal memperlihatkan bahwa program masih perlu diperkuat sebagai sarana pendidikan. Sebagian siswa memahami halal sebatas boleh atau tidak boleh dikonsumsi dan belum menghubungkannya dengan kebersihan, keamanan, kandungan gizi, serta dampak makanan terhadap tubuh. Kebiasaan memilih makanan instan, jajanan kurang higienis, dan minuman tinggi gula juga masih ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tersedianya makanan dan terbentuknya literasi konsumsi sehat.

Kerentanan konsumsi siswa juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Data awal sekolah terhadap 500 keluarga menunjukkan bahwa 170 keluarga (34%) bekerja sebagai petani, 130 keluarga (26%) sebagai buruh harian, dan 80 keluarga (16%) sebagai nelayan. Sebanyak 250 keluarga (50%) berpendapatan kurang dari Rp1.500.000 per bulan, 175 keluarga (35%) berpendapatan Rp1.500.000–Rp2.500.000, dan hanya 75 keluarga (15%) berpendapatan di atas Rp2.500.000. Selain itu, 325 keluarga (65%) menerima bantuan sosial. Data ini memperlihatkan bahwa MBG relevan dengan kebutuhan nyata mitra, sekaligus menunjukkan pentingnya edukasi tentang pilihan pangan sehat yang terjangkau dan sesuai kondisi keluarga.

Program pengabdian sebelumnya cenderung memisahkan edukasi gizi, pendidikan karakter, dan penguatan kelembagaan sekolah. Padahal, pengembangan MBG membutuhkan keterhubungan antara tiga unsur tersebut. Nilai sedekah dan kepedulian sosial dapat memperkuat orientasi moral program (Rahma, Haqiah, & Nurhamidah, 2025), sedangkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat mengarahkan rantai pasok dan pemberdayaan pelaku usaha pangan lokal secara lebih berkeadilan (Rahmah & Said, 2025). Perdebatan mengenai kebijakan MBG juga menunjukkan perlunya kejelasan tata kelola, partisipasi masyarakat, dan evaluasi yang tidak berhenti pada keluaran administratif (Dakhoir, 2026).

Atas dasar itu, kegiatan PKM ini menawarkan pendampingan MBG berbasis nilai Hukum Ekonomi Syariah melalui edukasi gizi, literasi halal-*thayyib*, simulasi pemilihan makanan, pembiasaan konsumsi bertanggung jawab, dan penguatan peran guru. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai makanan sehat, halal, dan bergizi; membantu sekolah menjadikan MBG sebagai media pendidikan kesehatan dan karakter; serta membangun mekanisme pendampingan yang dapat diteruskan setelah kegiatan PKM berakhir.

Program ini secara substantif mendukung SDG 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera serta SDG 4 tentang pendidikan berkualitas.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada 26 Agustus 2026 di SMP Swasta Daerah Sei Bejangkar, Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, edukatif, dan keagamaan. Mitra terlibat dalam identifikasi kebutuhan, penentuan peserta, penyediaan tempat, pendampingan, evaluasi, dan perencanaan keberlanjutan. Tim pelaksana terdiri atas dosen dengan kepakaran Hukum Ekonomi Syariah, administrasi publik, manajemen, akuntansi, dan hukum, serta mahasiswa yang membantu koordinasi, pengumpulan data, dan dokumentasi. Kegiatan diikuti oleh unsur pimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan tim pengabdian, dengan sasaran manfaat yang diarahkan kepada siswa melalui penguatan peran guru dan sekolah.

Tahap pertama adalah diagnosis awal melalui telaah data sekolah, observasi kebiasaan konsumsi, wawancara dengan pengelola sekolah, dan kuesioner singkat. Diagnosis diarahkan pada empat aspek: pemahaman gizi seimbang, pemahaman halal-thayyib, kebiasaan membeli jajanan, dan dukungan sekolah terhadap pembiasaan hidup sehat. Tahap kedua berupa penyusunan materi dan media edukasi dengan bahasa yang sesuai usia siswa. Materi meliputi fungsi zat gizi, pentingnya sarapan, pembacaan sederhana label pangan, kebersihan makanan, prinsip halal-thayyib, larangan berlebih-lebihan, dan tanggung jawab menjaga kesehatan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pemaparan materi, dialog interaktif, pembahasan kasus konsumsi sehari-hari, serta refleksi terhadap pelaksanaan MBG. Materi mencakup gizi seimbang, pentingnya sarapan, kebersihan makanan, prinsip halal-thayyib, larangan berlebih-lebihan, dan tanggung jawab menjaga kesehatan. Guru dan tenaga kependidikan menghubungkan materi dengan kebiasaan siswa di sekolah. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi, tanya jawab, umpan balik peserta, dan refleksi bersama pihak sekolah. Karena kegiatan tidak menggunakan tes kuantitatif terdokumentasi, perubahan hasil dianalisis secara deskriptif berdasarkan perbedaan pemahaman awal dan kemampuan peserta menjelaskan kembali materi pada akhir kegiatan.

Keberhasilan program dinilai pada tiga tingkat. Tingkat keluaran mencakup terlaksananya edukasi, tersedianya media, dan terbentuknya guru pendamping. Tingkat hasil mencakup peningkatan pengetahuan mengenai gizi dan halal-thayyib serta tumbuhnya niat memilih makanan sehat. Tingkat keberlanjutan mencakup penggunaan media edukasi, pengintegrasian pesan sehat dalam kegiatan sekolah, dan monitoring sederhana oleh guru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diagnosis Kondisi Mitra

Tahap diagnosis menghasilkan dua kelompok temuan. Pertama, terdapat kerentanan ekonomi keluarga yang dapat membatasi konsistensi pemenuhan makanan bergizi. Kedua, terdapat kesenjangan literasi siswa: istilah halal relatif dikenal, tetapi dimensi thayyib belum dipahami secara menyeluruh. Siswa cenderung menilai makanan dari rasa, harga, dan tampilan, sementara kebersihan, kandungan gula, komposisi, serta keseimbangan gizi belum selalu menjadi pertimbangan. Kondisi ini menguatkan alasan bahwa MBG perlu diposisikan sebagai pengalaman belajar, bukan hanya distribusi konsumsi.

Data sosial ekonomi tidak dimaksudkan untuk memberi label kepada keluarga, melainkan untuk menyesuaikan strategi edukasi. Pesan program diarahkan pada pilihan pangan sehat yang realistis, sederhana, dan tersedia secara lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena intervensi harus memberi manfaat tanpa menciptakan beban baru. Dalam konteks tersebut, sekolah menjadi ruang strategis untuk mempertemukan dukungan negara, pengetahuan gizi, pembentukan karakter, dan kebiasaan konsumsi sehari-hari.

Tabel 1. Profil sosial ekonomi awal keluarga siswa (n = 500)

No.	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Pekerjaan sebagai petani	170 keluarga	34%
2	Pekerjaan sebagai buruh harian	130 keluarga	26%
3	Pekerjaan sebagai nelayan	80 keluarga	16%
4	Pendapatan < Rp1.500.000/bulan	250 keluarga	50%
5	Pendapatan Rp1.500.000–Rp2.500.000/bulan	175 keluarga	35%
6	Pendapatan > Rp2.500.000/bulan	75 keluarga	15%
7	Tanggungan keluarga > 4 orang	150 keluarga	30%
8	Penerima bantuan sosial	325 keluarga	65%

Sumber: Data Diolah, 2026

2. Desain Pendampingan MBG Berbasis Nilai Syariah

Hasil diagnosis diterjemahkan menjadi lima pesan inti, yaitu makanan harus halal, makanan harus thayyib, konsumsi harus seimbang, makanan tidak boleh mubazir, dan kesehatan merupakan amanah. Kelima pesan tersebut digunakan sebagai benang merah antara materi gizi dan Hukum Ekonomi Syariah. Desain ini mencegah pemisahan antara pendidikan agama dan praktik kesehatan: siswa tidak hanya mengetahui status halal, tetapi juga memahami alasan memilih makanan yang bersih, aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan tubuh.

Pendampingan juga menggeser pusat kegiatan dari ceramah satu arah menuju pengalaman belajar. Pada sesi studi kasus, siswa membandingkan beberapa pilihan jajanan; pada simulasi, siswa membaca informasi kemasan dan mengidentifikasi unsur kebersihan serta gizi; sedangkan pada refleksi menu MBG, siswa mendiskusikan komposisi, porsi, dan sikap tidak berlebihan. Guru berfungsi sebagai fasilitator internal agar pesan program tidak berhenti setelah kunjungan tim. Pendekatan ini penting karena perubahan perilaku membutuhkan pengulangan, teladan, dan lingkungan yang konsisten.

Tabel 2. Tahapan pendampingan dan indikator pelaksanaan

No.	Tahap	Aktivitas utama	Indikator
1	Diagnosis	Observasi, wawancara, kuesioner, dan telaah data sekolah	Peta kebutuhan tersedia
2	Persiapan	Penyusunan modul, media, instrumen, dan koordinasi peserta	Perangkat siap digunakan
3	Edukasi	Gizi seimbang, halal-thayyib, label pangan, dan hidup sehat	Peserta aktif dan materi tersampaikan
4	Simulasi	Memilih makanan, menilai menu, dan refleksi perilaku konsumsi	Keterampilan praktis teramati

No.	Tahap	Aktivitas utama	Indikator
5	Evaluasi	Observasi, tanya jawab, respons peserta, dan refleksi guru	Perubahan pemahaman teridentifikasi secara deskriptif
6	Keberlanjutan	Penyerahan media dan penguatan guru pendamping	Tindak lanjut sekolah disepakati

Sumber: Data Diolah, 2026

3. Pelaksanaan Edukasi dan Partisipasi Mitra

Pelaksanaan menggunakan format yang ringkas dan mudah diterapkan pada lingkungan sekolah. Sekolah menyediakan ruang, mengoordinasikan peserta, dan menugaskan guru pendamping. Tim dosen menyampaikan materi sesuai kepakaran, sedangkan mahasiswa membantu registrasi, fasilitasi kegiatan, pengumpulan respons, serta dokumentasi. Pembagian peran ini memperkuat kepemilikan mitra sekaligus memberikan pengalaman belajar di luar kampus kepada mahasiswa.

Keterlibatan guru menjadi faktor kunci. Guru tidak hanya mendampingi peserta, tetapi juga terlibat dalam membaca respons, mengidentifikasi kebiasaan konsumsi siswa yang perlu diperbaiki, dan menyepakati bentuk penguatan setelah kegiatan. Dengan demikian, keberhasilan tidak diletakkan semata pada performa narasumber, melainkan pada kemampuan sekolah menginternalisasi pesan program ke dalam pembiasaan harian. Pola tersebut relevan dengan orientasi MBG sebagai instrumen pendidikan dan kesejahteraan, bukan sekadar layanan konsumsi (Sujud, 2026).

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 26 Agustus 2026, diawali dengan koordinasi dan pembukaan oleh pihak sekolah bersama tim Politeknik Negeri Medan. Sesi ini memuat penjelasan mengenai tujuan MBG, hubungan gizi dengan kesiapan belajar, makna halal dan thayyib, kebersihan serta keamanan makanan, perilaku tidak berlebihan, dan tanggung jawab sekolah dalam membentuk kebiasaan konsumsi sehat. Peserta mengikuti materi dengan tertib, menyampaikan pertanyaan, dan mendiskusikan praktik MBG serta kebiasaan konsumsi siswa. Dokumentasi memperlihatkan keterlibatan unsur pimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan tim pengabdian dalam penyampaian materi, dialog, dan penguatan komitmen tindak lanjut.



Gambar 1. Penyampaian materi dan dialog mengenai MBG berbasis nilai Hukum Ekonomi Syariah



Gambar 2. Partisipasi guru dan tenaga kependidikan dalam kegiatan edukasi



Gambar 3. Tim pengabdian dan mitra sekolah setelah pelaksanaan kegiatan

4. Evaluasi Peningkatan Pengetahuan dan Respons Peserta

Evaluasi diarahkan untuk membedakan antara keterlaksanaan kegiatan dan perubahan yang dihasilkan. Kehadiran peserta, distribusi media, dan selesainya penyuluhan merupakan keluaran; sedangkan peningkatan pengetahuan, perubahan cara menilai makanan, dan komitmen guru merupakan hasil. Pembedaan tersebut penting agar klaim efektivitas tidak hanya didasarkan pada antusiasme sesaat.

Evaluasi mencakup pemahaman gizi seimbang, fungsi sarapan, risiko konsumsi gula berlebih, perbedaan halal dan thayyib, kebersihan makanan, kemampuan memilih makanan sehat, serta perilaku tidak mubazir. Hasil observasi dan tanya jawab menunjukkan bahwa pada awal kegiatan pemahaman peserta masih terpusat pada aspek halal sebagai status hukum, sedangkan thayyib belum selalu dikaitkan dengan gizi, kebersihan, keamanan, dan kemanfaatan. Setelah pemaparan dan diskusi, peserta mampu menjelaskan hubungan halal-thayyib dengan kesehatan, mengidentifikasi ciri makanan yang lebih baik, dan merumuskan peran guru dalam penguatan kebiasaan siswa. Dengan demikian, evaluasi akhir menunjukkan peningkatan secara deskriptif pada seluruh indikator utama, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil evaluasi deskriptif program

No	Indikator	Kondisi Awal	Hasil Akhir	Perubahan
1	Pemahaman gizi seimbang	Terbatas pada pengertian umum	Mampu mengaitkan gizi dengan kesehatan dan belajar	Meningkat
2	Pemahaman halal dan thayyib	Halal dipahami sebagai boleh dikonsumsi	Halal-thayyib dipahami mencakup kebersihan, keamanan, dan manfaat	Meningkat
3	Kemampuan memilih makanan sehat	Pilihan dominan berdasar rasa dan harga	Mulai mempertimbangkan komposisi, kebersihan, dan keseimbangan	Meningkat
4	Kesadaran menghindari pemborosan	Belum menjadi perhatian utama	Memahami porsi secukupnya dan larangan mubazir	Meningkat
5	Komitmen menerapkan pola hidup sehat	Belum terstruktur dalam pembinaan	Guru dan sekolah menyepakati penguatan berkelanjutan	Menguat

Sumber: Data Diolah, 2026

5. Implikasi Program dan Keberlanjutan

Secara konseptual, pendampingan ini menghasilkan integrasi tiga lapis. Lapis pertama adalah literasi kesehatan yang membekali siswa dengan pengetahuan gizi dan kebersihan. Lapis kedua adalah literasi syariah yang memberi kerangka halal, thayyib, keseimbangan, dan kemaslahatan. Lapis ketiga adalah penguatan kelembagaan sekolah melalui guru pendamping dan media edukasi. Integrasi tersebut memperluas fungsi MBG dari pemenuhan kebutuhan jangka pendek menjadi pembentukan kapasitas siswa dan sekolah.

Program juga mempunyai kemungkinan dampak ekonomi lokal apabila pengadaan pangan dikembangkan melalui rantai pasok yang transparan, halal, dan melibatkan pelaku usaha setempat. Rahmah dan Said (2025) menekankan bahwa keterlibatan UMKM kuliner dalam rantai pasok MBG perlu memperhatikan keadilan kontrak, standar halal, kapasitas usaha, dan akuntabilitas. Meskipun aspek pengadaan bukan fokus utama kegiatan ini, literasi

siswa dan penguatan sekolah dapat menjadi fondasi bagi tata kelola pangan yang lebih bertanggung jawab.

Keberlanjutan program memerlukan mekanisme sederhana: media edukasi ditempatkan pada area yang mudah terlihat, pesan kesehatan diulang dalam kegiatan sekolah, guru melakukan observasi berkala, dan hasilnya dibahas bersama pengelola MBG. Pendekatan ini lebih realistis daripada membentuk struktur baru yang kompleks. Sekolah dapat mengembangkan indikator bulanan, misalnya pengurangan jajanan tinggi gula, peningkatan kebiasaan sarapan, keteraturan mencuci tangan, dan kemampuan siswa menjelaskan halal-thayyib.

6. Kendala dan Strategi Mitigasi

Kendala aktual selama kegiatan meliputi keterbatasan waktu tatap muka, variasi pemahaman awal peserta, serta perlunya menerjemahkan konsep Hukum Ekonomi Syariah ke dalam bahasa praktis yang mudah diterapkan di sekolah. Selain itu, kegiatan berlangsung dalam ruang sekolah dengan sarana sederhana sehingga pengelolaan waktu, suara, dan interaksi perlu disesuaikan. Tantangan substantif muncul ketika halal masih dipahami secara sempit, sedangkan aspek thayyib, komposisi gizi, kebersihan, keamanan pangan, dan pemborosan belum selalu dibaca sebagai satu kesatuan.

Tindakan korektif dilakukan dengan memadatkan materi menjadi lima pesan utama: halal, thayyib, seimbang, bersih, dan tidak mubazir serta memperbanyak contoh dari makanan dan jajanan yang dekat dengan kehidupan siswa. Penyampaian satu arah dikurangi melalui pertanyaan pemantik, dialog, dan klarifikasi langsung. Tim juga melibatkan guru sebagai penghubung agar materi dapat diteruskan kepada siswa. Penyesuaian ini membuat pembahasan lebih mudah dipahami dan menjaga keterlibatan peserta sampai kegiatan selesai.

Respons peserta terhadap kegiatan tergolong positif. Peserta mengikuti pemaparan secara aktif, memberikan tanggapan terhadap contoh yang disampaikan, dan menyatakan bahwa integrasi antara MBG, gizi, halal, serta thayyib relevan dengan kebutuhan sekolah. Bukti tindak lanjut ditunjukkan melalui komitmen pihak sekolah untuk menggunakan media dan pesan edukasi dalam pembinaan siswa, melibatkan guru dalam pemantauan kebiasaan konsumsi, serta memperkuat koordinasi dengan tim pengabdian. Keberadaan plang kegiatan di lingkungan sekolah dan dokumentasi bersama menjadi bukti kelembagaan bahwa program telah dilaksanakan dan diterima oleh mitra.

4. KESIMPULAN

Program PKM berhasil memperkuat pelaksanaan MBG di SMP Swasta Daerah Sei Bejangkar melalui integrasi edukasi gizi dan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. Kegiatan menghubungkan diagnosis kebutuhan, pemaparan interaktif, dialog, pendampingan guru, dan evaluasi deskriptif. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai gizi seimbang, makna halal-thayyib, kebersihan pangan, pemilihan makanan sehat, dan perilaku tidak mubazir. Kontribusi utama program terletak pada perubahan cara pandang terhadap MBG dari kegiatan pembagian makanan menjadi media pendidikan kesehatan, karakter, dan konsumsi bertanggung jawab.

Partisipasi aktif peserta, kemampuan menjelaskan kembali substansi materi, komitmen guru, penggunaan media edukasi, keberadaan plang kegiatan, dan dokumentasi pelaksanaan menunjukkan bahwa program diterima dengan baik oleh mitra. Keterbatasan waktu dan perbedaan pemahaman awal dapat diatasi melalui penyederhanaan pesan, penggunaan contoh konkret, dan dialog partisipatif. Sekolah disarankan melanjutkan edukasi melalui guru pendamping dan memasukkan pesan konsumsi sehat serta Islami dalam pembinaan rutin. Program lanjutan dapat diarahkan pada pengukuran perubahan perilaku siswa dalam jangka menengah dan penguatan rantai pasok pangan halal, sehat, serta berbasis potensi lokal.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Medan melalui pendanaan DIPA Tahun 2026, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Medan, serta pimpinan, guru, siswa, dan keluarga besar SMP Swasta Daerah Sei Bejangkar atas dukungan dan kemitraan dalam pelaksanaan program. Apresiasi juga disampaikan kepada mahasiswa yang terlibat dalam asistensi kegiatan, pengumpulan data, dan dokumentasi.

6. REFERENSI

- Carvallo, G., Clarisya, N. P., Sinaga, E. S., & Benu, S. E. (2026). Konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis terhadap hak pendidikan dasar. *Jurnal USM Law Review*, 9(2), 1351–1370.
- Dakhoir, A. (2026). Polemik kebijakan Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Tengah: Kajian filosofis ekonomi Islam. *Anterior Jurnal*, 25(2), 157–163.
- Nuraini, I., Sutopo, H., & Albab, U. (2025). Systematic literature review: Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(2), 262–276.
- Rahma, A. F., Haqiah, N. A., & Nurhamidah, W. I. (2025). Implementasi nilai-nilai hadis sedekah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MTsN 1 Sleman. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 6(3), 1707–1719.
- Rahmah, A., & Said, D. H. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberdayaan UMKM kuliner dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis. *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3), 1835–1846.
- Sujud, F. A. (2026). Upaya transformasi kesejahteraan dan keadilan sosial melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Ghobi*, 3(1), 24–37.